INDONESIA MAJU

KEMITRAAN SETARA DAN SALING SINERGIS *untuk* RANTAI PASOK YANG EFISIEN

oleh

Ir. Gulat MANURUNG, MP., C.APO
Ketua Umum DPP APKASINDO

SAWIT GOES TO CAMPUS

ROAD TES B50

www.dpp-apkasindo.com

DEWAN PIMPINAN PUSAT
ASOSIASI PETANI KELAPA SAWIT INDONESIA
(Indonesian Palm Oil Smallholder's Association)

VISI APKASINDO

1. Membantu Pemerintah dan stakeholders mempersiapkan dan mendampingi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Petani Swadaya dan Petani Plasma) menjadi Petani Kelapa Sawit Mandiri, Profesional dengan konsep sustainable;
2. Menjembatani kepentingan Petani Kelapa Sawit Indonesia dengan Pemerintah dan Stakeholders melalui kerjasama saling menguntungkan;
3. Melindungi dan mengadvokasi Petani Kelapa Sawit Indonesia dari tindakan yang merugikan Petani;

MISI APKASINDO

1. Mensinergikan kekuatan Petani Kelapa Sawit Indonesia dengan Program Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas kebun sawit rakyat;
2. Menyatukan seluruh elemen Petani Kelapa Sawit Indonesia supaya menjadi kekuatan untuk mencapai visi Apkasindo;
3. Membangun jaringan kerja Ekonomi Kerakyatan yang berbasis kelapa sawit untuk meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit indonesia;

22 DPW PROVINSI SE-INDONESIA

1. Aceh
2. Sumatra Utara
3. Sumatra Barat
4. Riau
5. Jambi
6. Sumatera Selatan
7. Lampung
8. Bengkulu
9. Bangka Belitung,
10. Banten
11. Kalimantan Tengah
12. Kalimantan Selatan
13. Kalimantan Barat
14. Kalimantan Utara
15. Kalimantan Timur
16. Sulawesi Tenggara
17. Sulawesi Tengah
18. Sulawesi Barat
19. Sulawesi Selatan
20. Gorontalo
21. Papua Barat
22. Papua

116 DPD KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA

SEKRETARIAT DPP :
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
Kantor Pusat Kementerian Pertanian RI
Gedung C. LT. 5/Ruang 508
Jl. RM. Harsono No. 3 Ragunan Jakarta 125
Telp/Fax : 021 - 781 9986
Hp : 0811 752 111
Email : dppapkasindo@yahoo.co.id

COUNTERPART OFFICE PEKANBARU :
Jl. Arifin Ahmad No. 138 A-B
Marpoyan Damai, Pekanbaru - Riau

Persaingan Panas Berebut Pasar Minyak Nabati?

@arifai7 & @mogumo_

Konsumsi Minyak Nabati Dunia

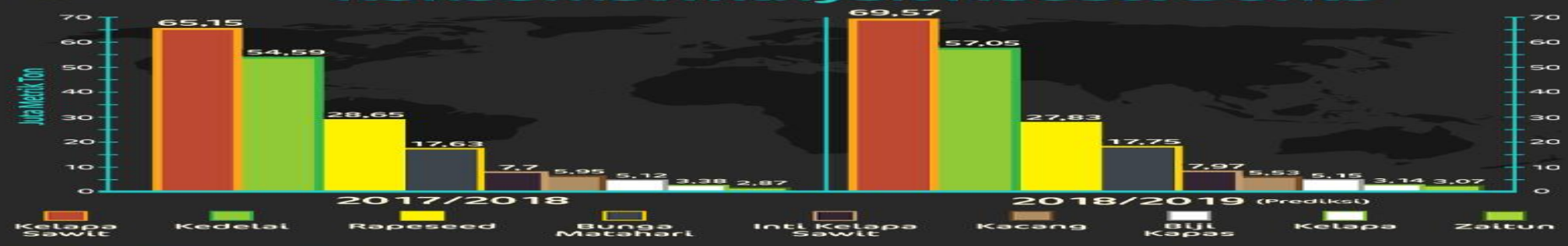

Jumlah Produksi Agrikultur 2017/2018

Dalam Juta Metrik Ton

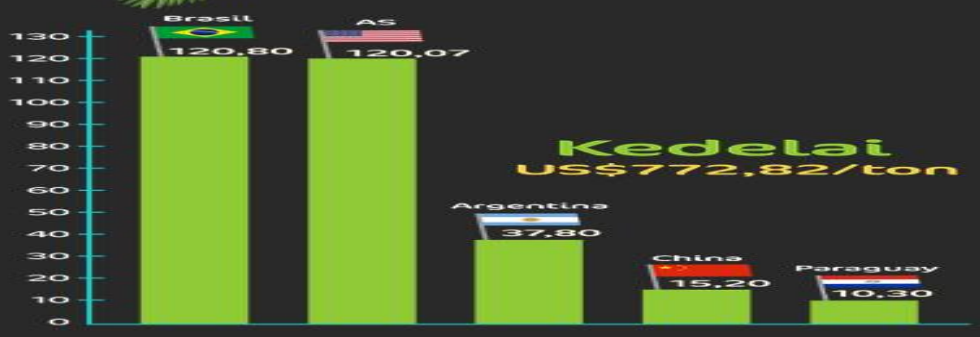

Kedelai
US$772,82/ton

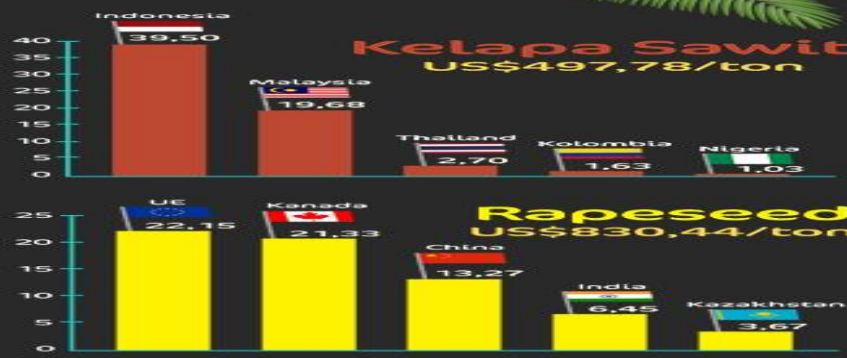

Kelapa Sawit
US$497,78/ton

Rapeseed
US$830,44/ton

Fakta Persaingan Panas

- **Deforestasi - Untuk produksi 1 ton**

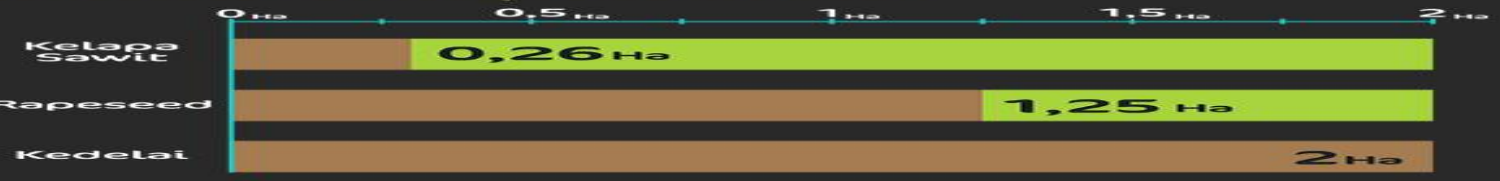

- **Perluasan lahan** (2016)

KEMITRAAN SINERGIS = PENGUATAN KELEMBAGAAN

01

1. PERMASALAHAN KEMITRAAN

02

2. MODEL KEMITRAAN = SETARA

03

3. RANTAI PASOK

04

4. KEBERLANJUTAN

PENGEMBANGAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT RAKYAT

41%
5,8 M ha

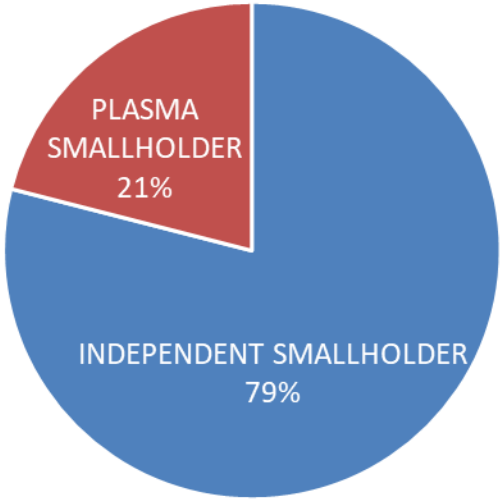

2020

Plasma 7-10%
Petani Mandiri
90-93%

?

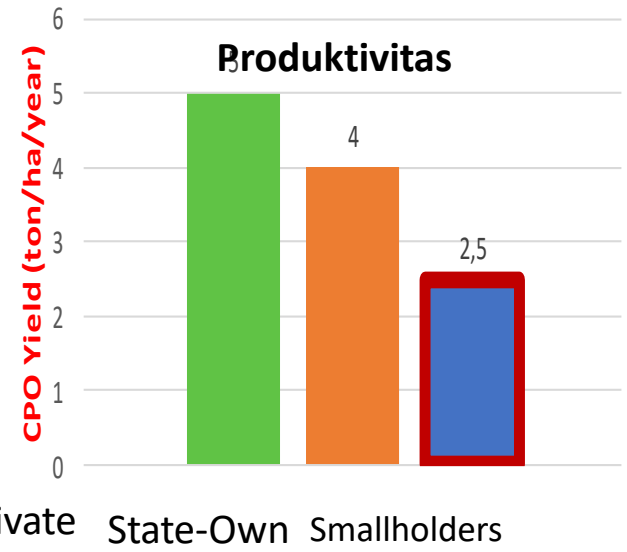

INI POTENSI bukan PERMASALAHAN

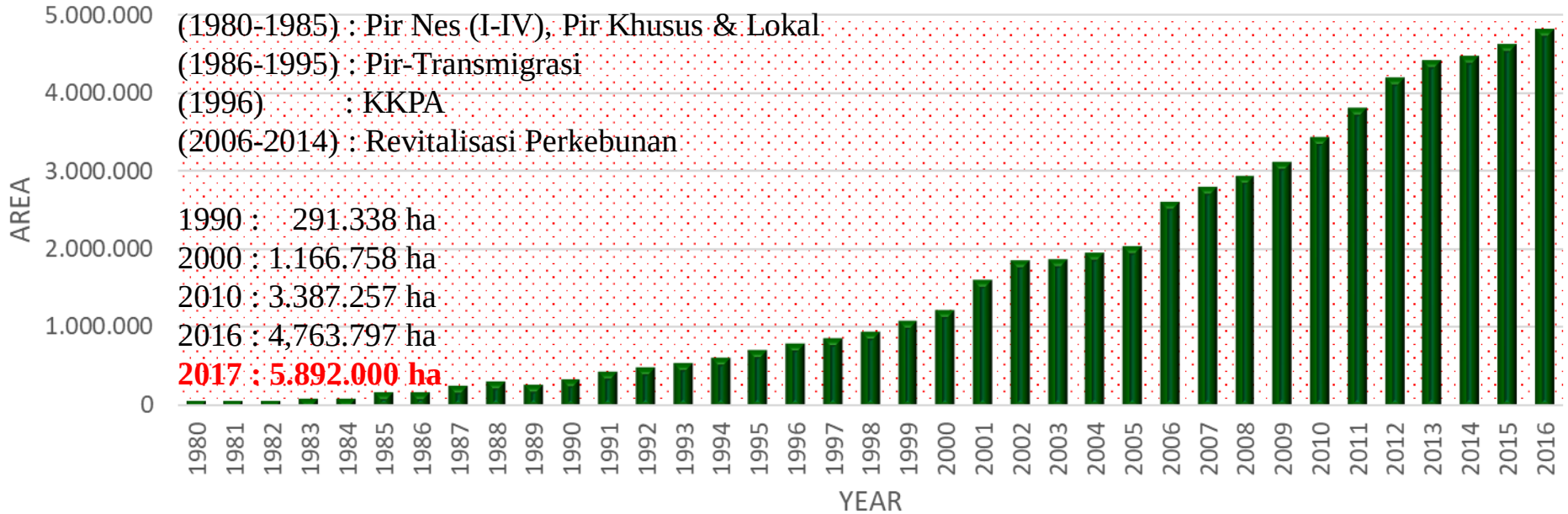

PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI

SETARA

Pengembangan kelembagaan petani diarahkan untuk menjadi **kelembagaan ekonomi petani** guna **meningkatkan skala ekonomi, efisiensi usaha**, dan **posisi tawar** **DENGAN KONSEP KESETARAAN**

PENGERTIAN KEMITRAAN

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Mitra adalah teman, kawan kerja, pasangan kerja, rekan.

Kemitraan artinya perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra.

Dr. Muhammad Jafar Hafsah

Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.

PARADIGMA PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI

- Kepemimpinan
- Kewirausahaan
- Manajerial
- Modal Usaha
- Sarana dan Prasarana
- Penghargaan

SETARA

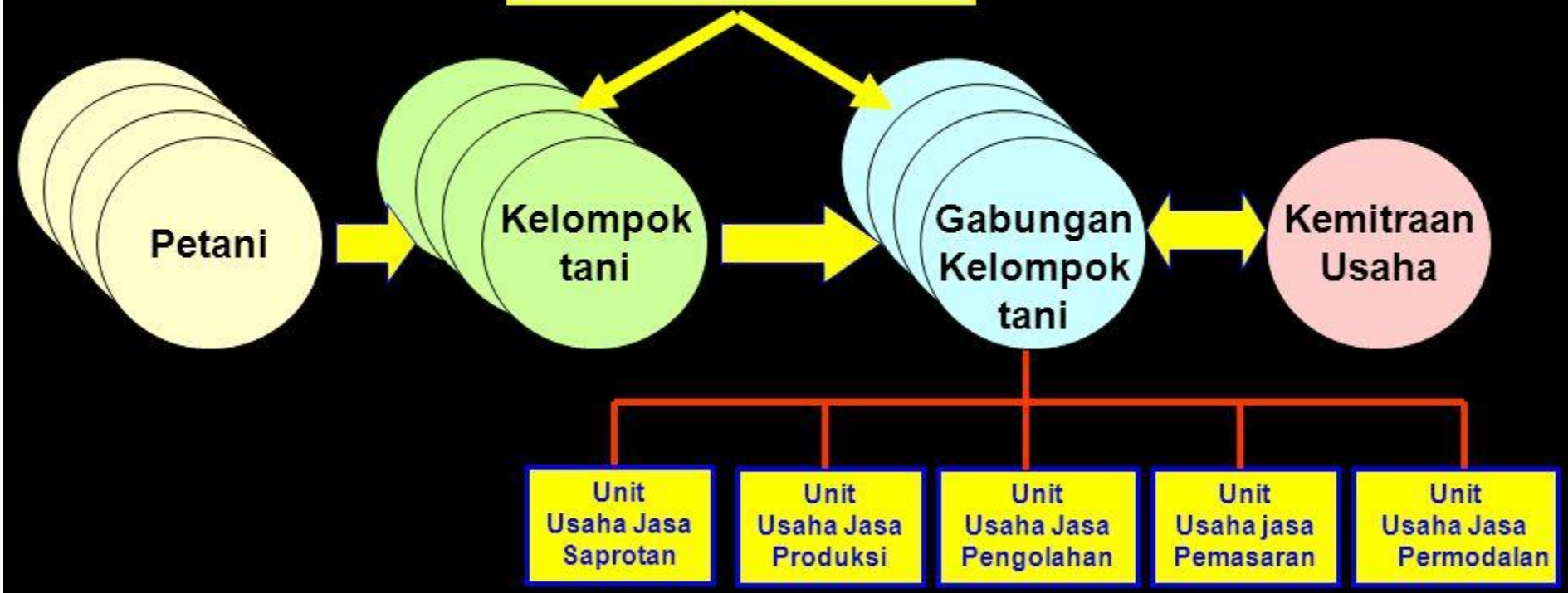

(Peraturan Menteri Pertanian , nomor : 273/Kpts/ OT.160/4/2007, tanggal 13 April 2007, tentang Pembinaan Kelembagaan Petani)

ROH POLA KEMITRAAN SETARA

TUJUAN KEMITRAAN :

- **Memberi kepastian**
- Meningkatna nilai tambah bagi yang bermitra
- Meningkatkan pemerataan dan pemberyaan masyarakat dan usaha kecil
- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
- Memperluas lapangan kerja

CONTOH KEMITRAAN NEGATIF

Potensi Pelanggaran

1. Pola kemitraan yang dijalin tidak terjadi proses penguatan dan/ atau pun peng[illegible]dap pekebun plasma, tercermin dari pola pengelolaan kebun yang dilakukan sepe[illegible]usahaan untuk kurun waktu 30 tahun ;
2. Meskipun pengoperasian pengelolaan lahan dilakukan oleh perusahaan [illegible] biaya operasional termasuk didalamnya biaya tenaga dibebankan sebagai beban ko[illegible]sma. Bahkan koperasi harus mengganti dan membebaskan perusahaan terhadap [illegible]n kerusakan yang dapat diderita perusahaan *(lihat ketentuan perjanjian 5.11)*
3. Dalam hal terjadi kekurangan pembiayaan, peru[illegible] menyediakan pembiayaan kepada koperasi. Jumlah pembiayaan skema plasma di[illegible]kan oleh perusahaan atas kebijakannya sendiri
4. Setelah dilunasinya pinjaman, bukti ke[illegible]s tanah diserahkan kembali ke perusahaan
5. Wilayah perkebunan plasma da[illegible]eriluas, dipersempit, guna mendapatkan hasil yang di inginkan. Koperasi tidak be[illegible] tuntutan sehubungan pengurangan/ penambahan cakupan, pergeseran batas da[illegible]nan plasma. Koperasi mengikatkan diri mengganti kerugian perusahaan dari d[illegible]gala tuntutan dalam bentuk apapun terhadap perusahaan akibat pengurangan/[illegible]apan

Poko[illegible]janjian diatas berpotensi terjadi penguasaan inti terhadap plasmanya, di[illegible] kewajiban yang tidak seimbang, pembebanan baiaya operasional kepada plas[illegible]share keuntungan koperasi yang relatif tidak proporsional. KPPU mengharapkan [illegible]ada perbaikan ketentuan perjanjian kemitraan untuk substansi pasal diatas.

WAJAR SAJA KELUAR DARI KEMITRAAN

PERBAIKAN POLA KEMITRAAN

- Transparansi perhitungan biaya operasional yang wajar terutama yang mengakibatkan tunggakan hutang kepada inti
- Perbaikan dan evaluasi dalam pengelolaan perkebunan sawit ;
- Perbaikan infrastruktur, dan pengangkutan hasil panen yang rutin;
- Distribusi pendapatan dan keuntungan yang proporsional;
- Penetapan harga tandan buah segar sawit serendah- rendahnya sesuai dengan harga referensi yang ditetapkan Gubernur;
- Hubungan dan komunikasi yang baik dengan pemilik dan manajemen perusahaan

SEPAKAT ?
Yes or No

APA ITU KESETARAAN ?

Pengertian KESETARAAN adalah persamaan kedudukan, persamaan tingkatan, tak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, sederajat.

KOSEP SETERAAN :

1. **KETERBUKAAN MANAJEMEN**
2. **SALING MENGUNTUNGKAN**
3. **AUDIT**
4. **PROFESIONALISME**
5. **KEBERLANJUTAN**

MENGAPA ADA PERMASALAHAN
(padahal tujuannya mulia?)

- KETERBUKAAN MANAJEMEN (54%)
- PETANI INGIN MANDIRI (12 %)
- PERGESERAN KOMITMEN (19 %)
- PERUSAHAAN MITRA KETERPAKSAAN (11%)
- LAIN-LAIN 4%

PETANI SAWIT GENERASI KE-2

KEMITRAAN SINERGIS = PENGUATAN KELEMBAGAAN

01

1. PERMASALAHAN KEMITRAAN

02

2. MODEL KEMITRAAN = SETARA

03

3. RANTAI PASOK

04

4. KEBERLANJUTAN

KERJASAMA akan menjadi PENGAWAS KEMITRAAN

KOMISI ISPO

CPOPC

DAMIMAS

PPKS

BPDP KS

CPO fund Agency

DEWAN MINYAK SAWIT INDONESIA (DMSI)

GOVERNMENT

SURVEYOR INDONESIA

LS-MUTU AGUNG

LOCAL GOVERNMENT

INSTIPER, IPB, UGM, UNRI

GAPKI

Indonesia Palm Oil Association

UNDP

EDUCATIONAL AND RESEARCH INSTITUTE

NGO

ASOSIASI PETANI KELAPA SAWIT INDONESIA

APKASINDO

Kerjasama adalah MODAL AWAL KONSEP KEMITRAAN SETARA

RISTEKDIKTI
FTP UGM
RAPAT TERBUKA SENAT
DALAM RANGKA DIES NATALIS KE-56
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA
PENGUATAN PERAN TEKNOLOGI PERTANIAN DALAM PENGEMBANGAN
DAN INOVASI AGROINDUSTRI INDONESIA DI ERA DIGITAL
Yogyakarta, 19 September 2019
Prof. Y. Marsono
DEKAN
SEKRETARIS SENAT

MODEL KEMITRAAN SETARA

- KESAMAAN KEDUDUKAN
- KETERBUKAAN

NILAI TAWAR

PETANI SAWIT NAIK KELAS

MODEL KEMITRAAN KONVENSIONAL
(satu arah)

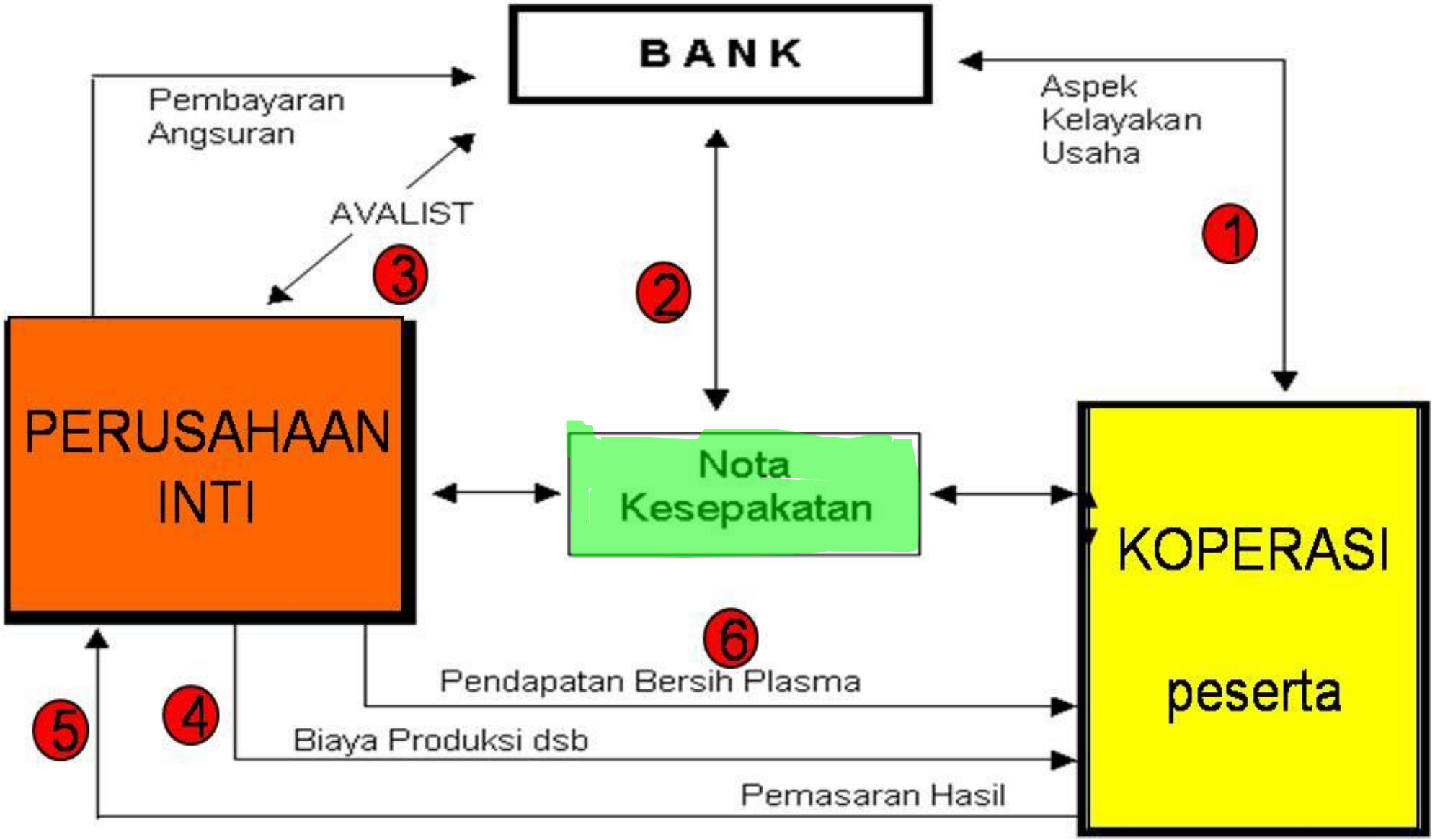

MODEL KEMITRAAN KONVENSIONAL

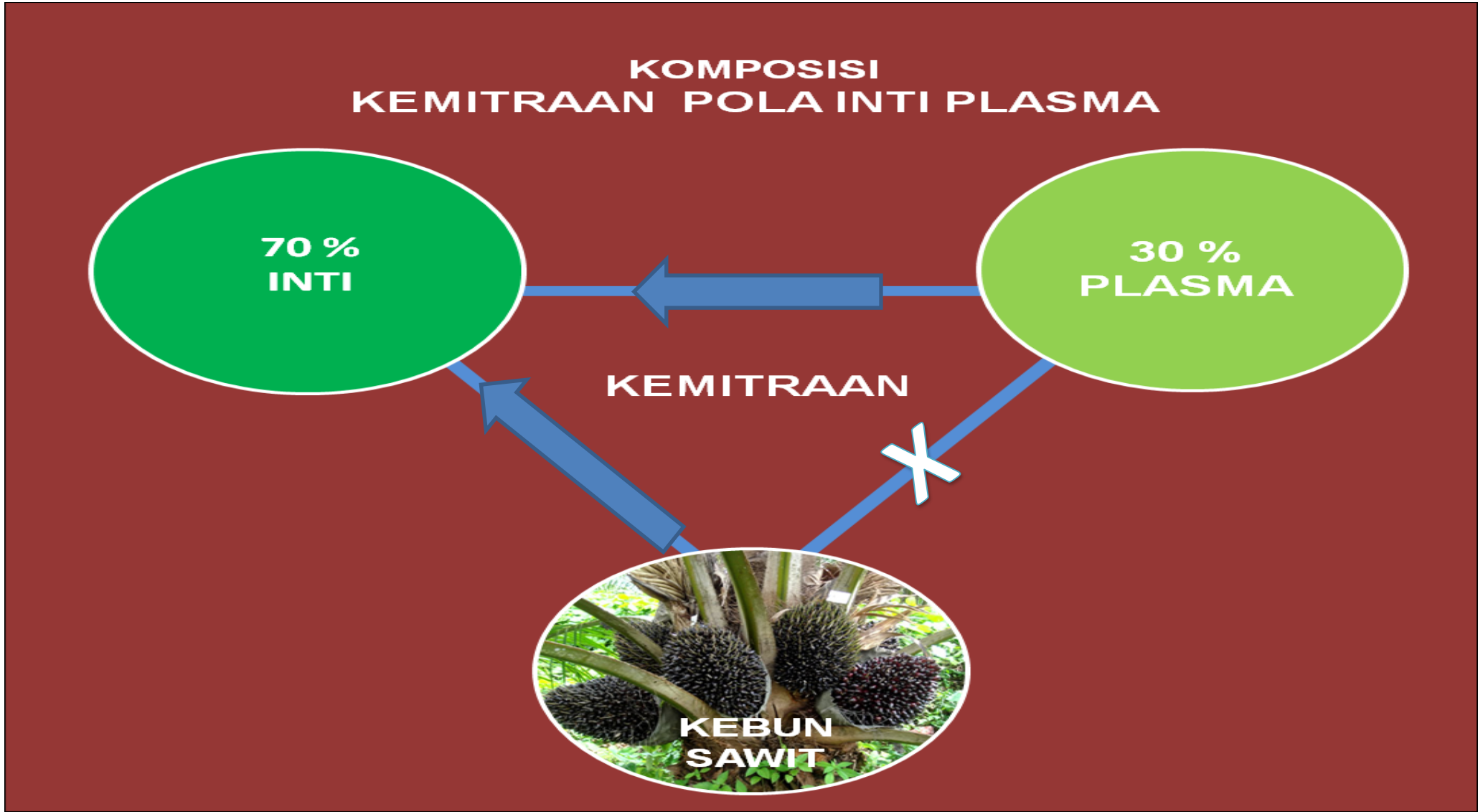

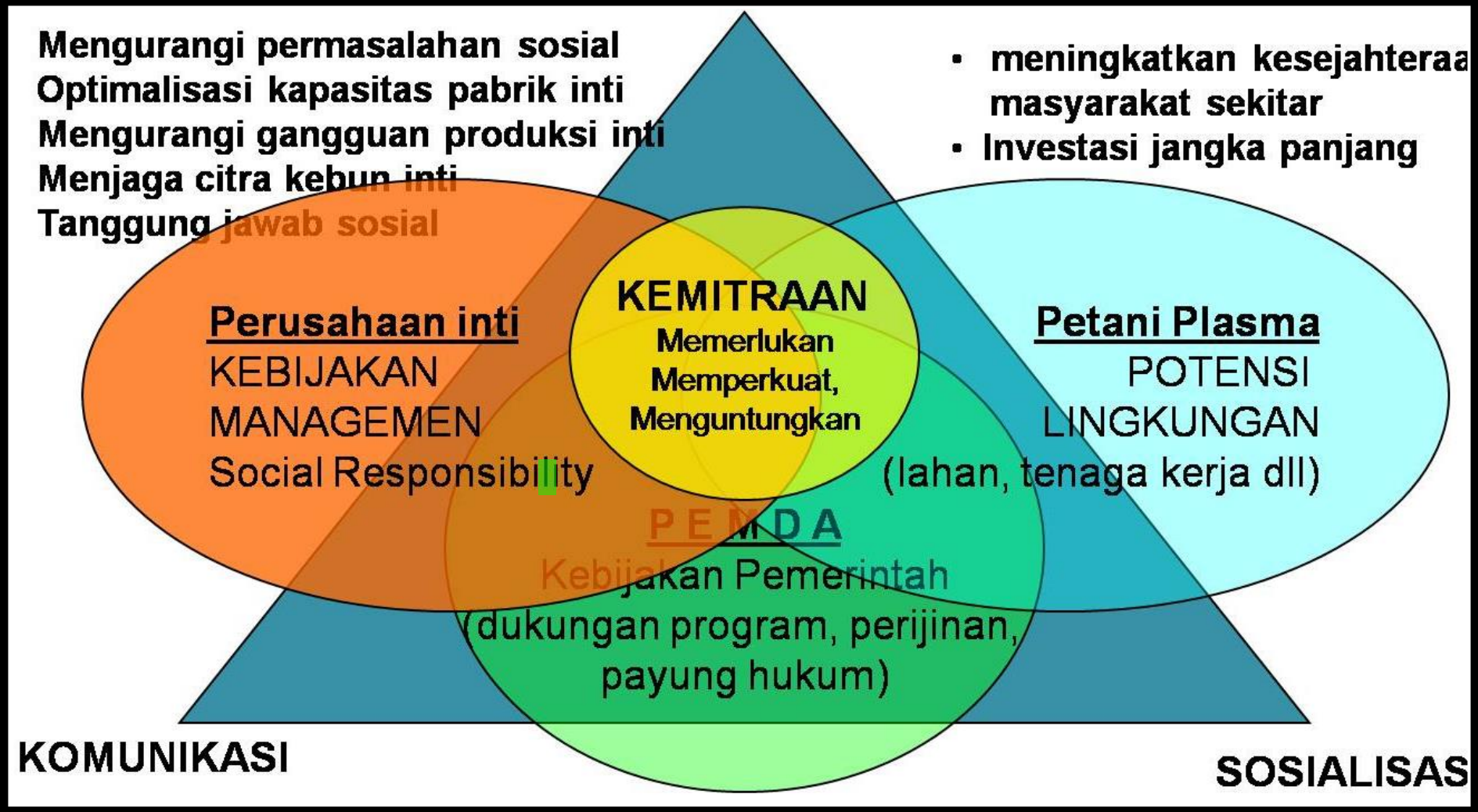

Model kemitraan SETARA

PENGUATAN KELEMBAGAAN PETANI

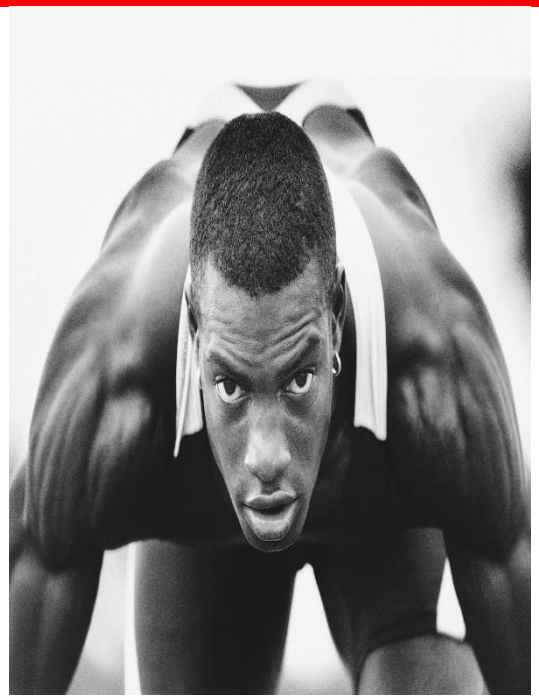

sinarmas
agribusiness and food
Sawit Indonesia

PPN
RISET

ASOSIASI PETANI KELAPA SAWIT INDONESIA
DEWAN PIMPINAN WILAYAH PROVINSI RIAU
"BANGGA
JADI PETANI SAWIT"

PTPN V-
APKASINDO

FGD
FOCUS GROUP DISCUSSION
TATA NIAGA TBS KELAPA SAWIT
26 Juli 2018

INSTIPER JOGJA

LPP PERKEBUNAN JOGJA

D1, D3, D4

STIPAP MEDAN

POLTEK SAWIT CWE JAWA BARAT

POLTEK SAWIT KAMPAR RIAU

D1, D3, D4

KOORDINASI RUTIN DENGAN DEWAN PEMBINA DAN DEWAN PAKAR APKASINDO

mutu
international
Penandatanganan Nota Kesepahaman
PT. Mutuagung Lestari dengan APKASINDO
Bersama Mewujudkan Petani Kelapa Sawit
Indonesia Setara dan Berkelanjutan

PETANI SAWIT SETARA

JALINAN KERJASAMA SESAMA ORGANISASI PETANI SAWIT SAMADE DAN ASPEK PIR

JALINAN KERJASAMA
PESANTREN
DAN
BIARAWATI KESUSTERAN

FORWATAN
Sawit Indonesia
DISKUSI MAJALAH SAWIT INDONESIA
EVALUASI PENYERAPAN CPO
BERSERTIFIKAT DI PASAR GLOBAL
JAKARTA, 26
2019
EVALUASI PENYERAPAN
CPO BERSERTIFIKAT
DI PASAR GLOBAL

DISKUSI MAJALAH SAWIT INDONESIA
EVALUASI PENYERAPAN CPO
BERSERTIFIKAT DI PASAR GLOBAL
JAKARTA, 26 NOVEMBER 2019

PETANI JIKA INGIN NAIK KELAS HARUS
BELAJAR seperti ke DMSI

4 ORANG PENGURUS DPP SUDAH DISEKOLAHKAN SEBAGAI AUDITOR ISPO

PR

PROGRAM DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH MENUJU KESETARAAN

1. Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya (STDB) untuk Lahan Perkebunan
2. Legalitas Lahan Perkebunan
3. Status Kawasan Perkebunan
4. Sertifikasi *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO)

Petani / Anggota

KOPERASI SETARA

1. Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dana Hibah dari BPDP-KS
2. Bantuan Sarana Dan Prasarana Perkebunan
3. Harga TBS sesuai dengan harga penetapan Pemerintah (lebih mahal dari harga pasaran)

KARENA BAGAIMANA MAU MENUNTUT KESETARAAN JIKA PETANINYA GAK JELAS

KEMITRAAN SINERGIS = PENGUATAN KELEMBAGAAN

01

1. PERMASALAHAN KEMITRAAN

02

2. MODEL KEMITRAAN = SETARA

03

3. RANTAI PASOK

04

4. KEBERLANJUTAN

Realita, Tantangan dan Hambatan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat

PERUBAHAN PERSOALAN PETANI SAWIT
(PERIODE 2008 - 2018)

1. KETERSEDIAAN BIBIT
2. PEMAHAMAN PUPUK & PEMUPUKAN
3. SARANA PRODUKSI dan HARGA TBS
4. PANEN DAN PASCA PANEN
5. SDM PETANI (TINGKAT PENDIDIKAN)
6. PERAWATAN TANAMAN
7. SENGKETA LAHAN
8. SISTEM BIROKRASI RIBET
9. INFRASTRUKTUR
10. REGULASI PEMERINTAH- KAWASAN

1. REGULASI PEMERINTAH – KAWASAN HUTAN
2. INFRASTRUKTUR
3. SARANA PRODUKSI dan HARGA TBS
4. SENGKETA LAHAN (V-H)
5. PANEN DAN PASCA PANEN
6. PEMAHAMAN PUPUK & PEMUPUKAN
7. PERAWATAN TANAMAN
8. SISTEM BIROKRASI RIBET
9. SDM PETANI (TINGKAT PENDIDIKAN)
10. KETERSEDIAAN BIBIT

R&D DPP APKASINDO

RANTAI PASOK TBS

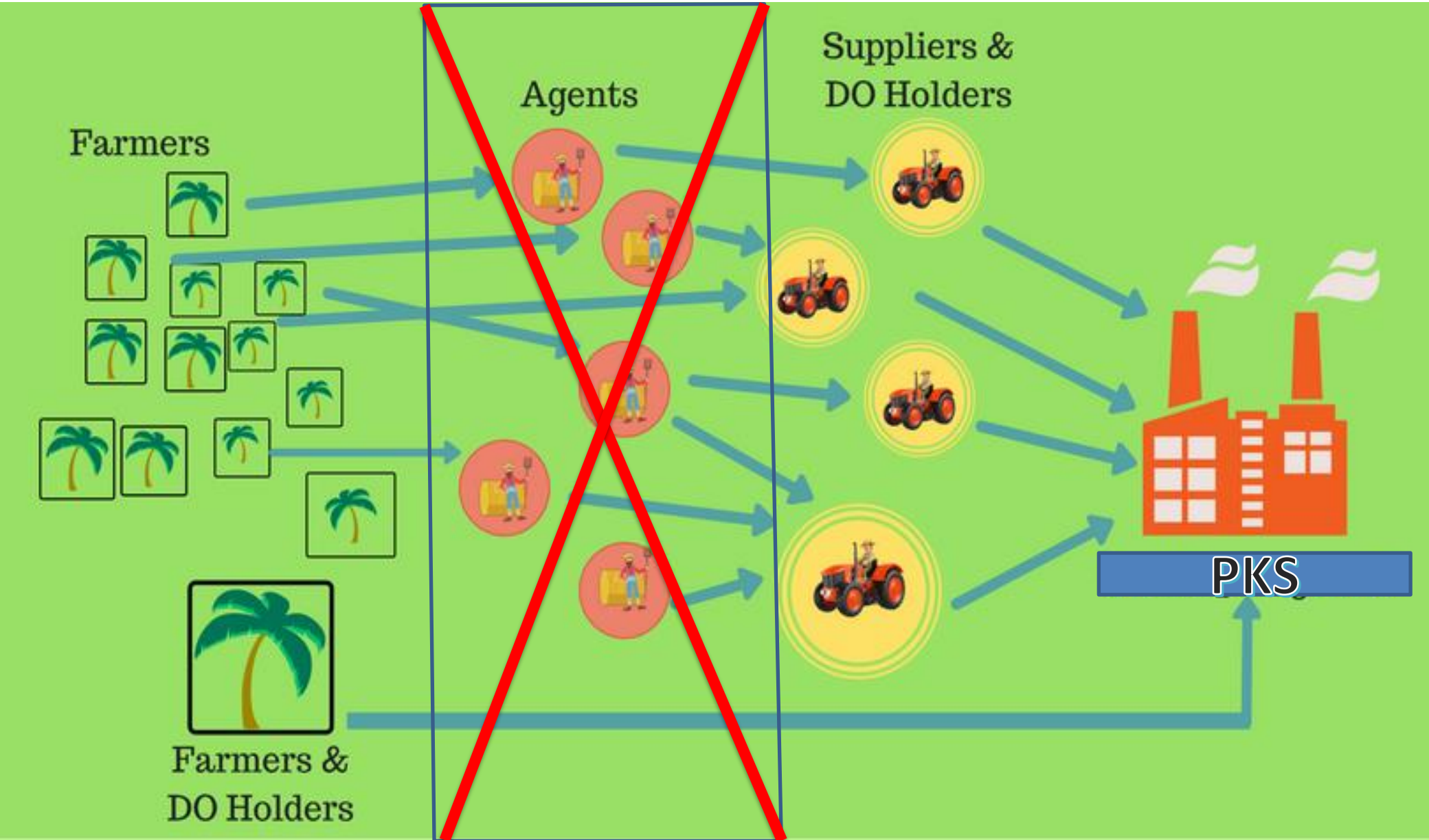

RANTAI PASOK HUBUNGANNYA ke PRINSIP ISPO ?

PERUSAHAAN PERKEBUNAN

1. LEGALITAS USAHA PERKEBUNAN
2. MANAJEMEN PERKEBUNAN
3. PERLINDUNGAN TERHADAP PE-MANFAATAN HUTAN ALAM PRI MER & GAMBUT
4. PENGELOLAAN dan PEMANTAUAN LINGKUNGAN
5. TANGGUNGJAWAB THD PEKERJA
6. TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7. PENINGKATAN USAHA SECARA BERKELANJUTAN

KEBUN PLASMA

1. LEGALITAS USAHA KEBUN PLASMA
2. MANAJEMEN USAHA KEBUN PLASMA
3. PENGELOLAAN dan PEMAN-TAUAN LINGKUNGAN
4. TANGGUNGJAWAB THD KESE HATAN dan KESELAMATAN KERJA (K3)
5. TANGGUNG JAWAB SOSIAL & PEMBERDAYAAN MASYARA-KAT
6. PENINGKATAN USAHA SCR BERKELANJUTAN

KEBUN SWADAYA

1. LEGALITAS USAHA KEBUN SWADAYA
   (al:sertifikat tanah, STD-B, dok kerjasama)
2. ORGANISASI PEKEBUN dan PENGELOLAAN KEBUN SWADAYA
   (al: SOP, GAP, Pencatatan)
3. PENGELOLAAN dan PEMANTAUAN LINGKUNGAN
   (al: izin lingkungan SPPL)
4. PENINGKATAN USAHA SECARA BERKELANJUTAN

KEMITRAAN SEBAGAI PEMASOK TBS

PEKEBUN

PEKEBUN

PEKEBUN

PEKEBUN

PEKEBUN

PEKEBUN

KEMITRAAN SEBAGAI PLASMA

KEMITRAAN SINERGIS = PENGUATAN KELEMBAGAAN

01

1. PERMASALAHAN KEMITRAAN

02

2. MODEL KEMITRAAN = SETARA

03

3. RANTAI PASOK

04

4. KEBERLANJUTAN

KOMITMEN KEBERLANJUTAN VS KAPASITAS PETANI

- Tekanan global/nasional dan komitmen berkelanjutan dari perusahaan semakin besar
- Perusahaan ingin agar pemasok (termasuk petani swadaya) juga mengikuti komitmen itu
- Masalah2 di petani → kemampuan memenuhi aspek lingkungan dan sosial → pemenuhan standar
- Dikeluarkan dari rantai pasok?

Inpres Rencana Aksi Nasional
Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan 2019–2024

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 22 November 2019 menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024.

Tujuan Inpres

- Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun;
- Penyelesaian status dan legalisasi lahan;
- Pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan dan meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan;
- Mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan.

Tindakan

Penguatan data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur

Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun

Melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

Menerapkan tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa

ISPO

Melakukan dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) dan meningkatkan akses pasar produk kelapa sawit

www.bpdp.or.id

sawit

PETA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

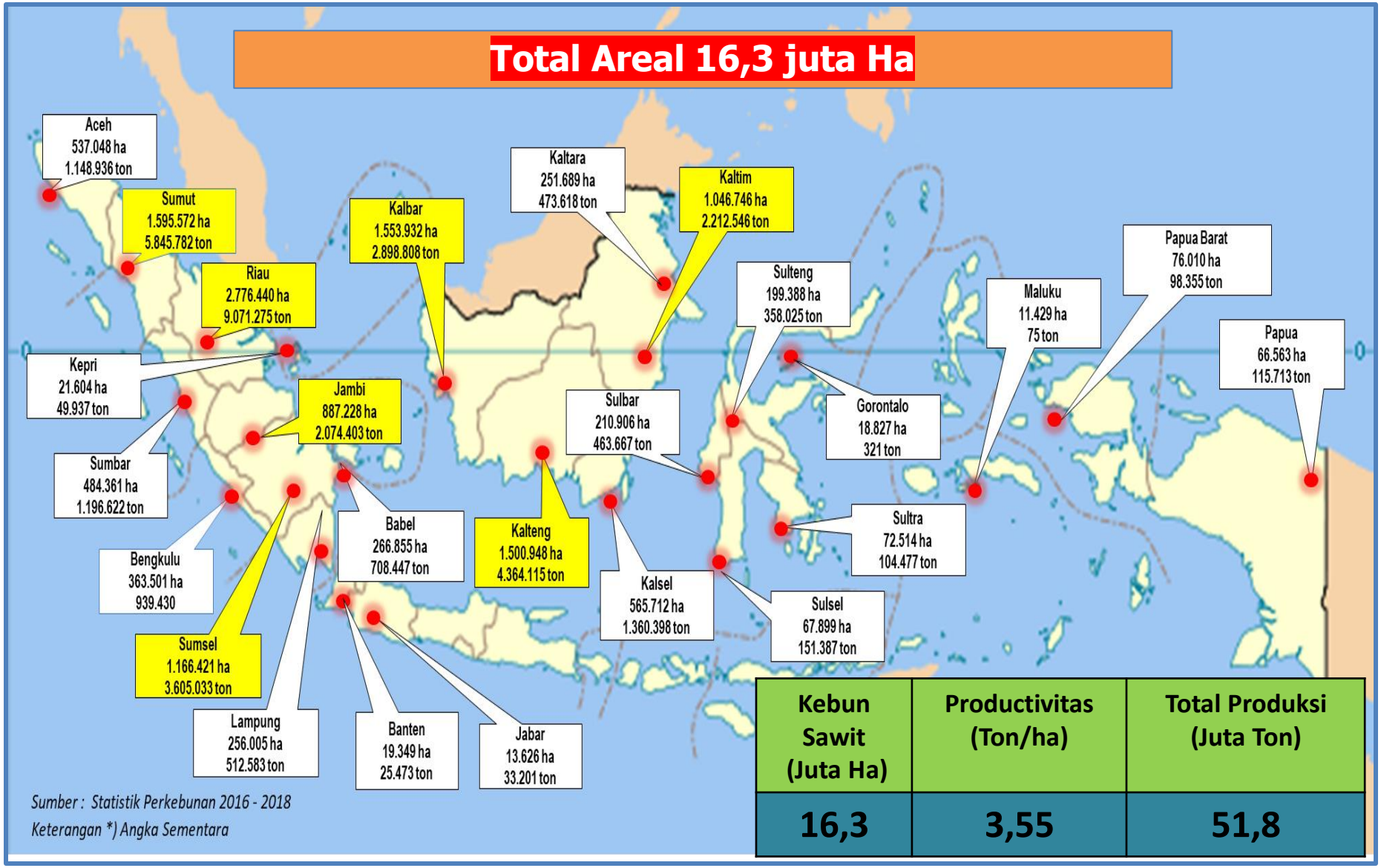

Kebun Sawit (Juta Ha)	Productivitas (Ton/ha)	Total Produksi (Juta Ton)
16,3	3,55	51,8

MoU DENGAN EXXON MOBIL
bentuk kemitraan SETARA
28 AGUSTUS 2020

SALAM SETARA PETANI SAWIT INDONESIA

DPP APKASINDO
ASOSIASI PETANI KELAPA SAWIT INDONESIA
APKASINDO
PROVINSI BANTEN
PROVINSI TENGAH
PROVINSI JAMBI
PROVINSI ACEH
SALAM SETARA PETANI SAWIT